

**TINJAUAN *SIYĀSAH SYAR'IIYAH* TERHADAP PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 21 TAHUN 2020 TENTANG PEMBATAAN
SOSIAL BERSKALA BESAR DI INDONESIA**

SKRIPSI

Oleh

Muhammad Gilang Romadhon

NIM. 05040422098



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum Tata Negara

Surabaya

2026

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Gilang Romadhon
NIM : 05040422098
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Tata Negara (Siyasah)
Judul : TINJAUAN SIYĀSAH SYAR'ITYYAH TERHADAP
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 21 TAHUN 2020
TENTANG PEMBATAAN SOSIAL BERSKALA
BESAR DI INDONESIA

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya sesuai kaidah penulisan karya ilmiah. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini adalah hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 10 Februari 2026

Yang menyatakan



Muhammad Gilang Romadhon

NIM. 05040422098

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Gilang Romadhon

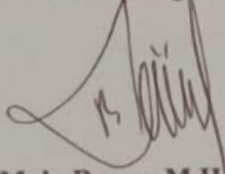
NIM : 05040422098

Judul : TINJAUAN SIYĀSAH SYAR'IYYAH TERHADAP
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 21 TAHUN 2020
TENTANG PEMBATAAN SOSIAL BERSKALA BESAR DI
INDONESIA

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan pada sidang
munaqasah skripsi.

Surabaya, 12 Februari 2026

Pembimbing,



Moh. Bagus, M.H.

NIP. 199511052022031001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Gilang Romadhon

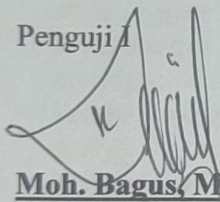
NIM. : 05040422098

Judul : TINJAUAN SIYĀSAH SYAR'IYYAH TERHADAP
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 21 TAHUN 2020
TENTANG PEMBATAAN SOSIAL BERSKALA BESAR DI
INDONESIA

Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi pada hari Rabu, tanggal 04 Maret 2026, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya.

Majelis Munaqasah Skripsi

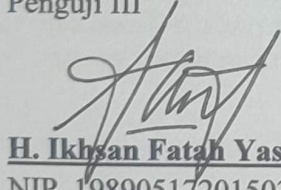
Penguji I



Moh. Bagus, M.H.

NIP. 199511052022031001

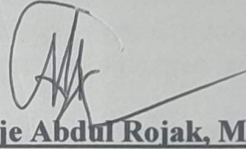
Penguji III



H. Ikhsan Fatah Yasin, S.H.I., M.H.

NIP. 198905172015031006

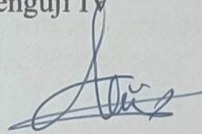
Penguji II



Drs. Jeje Abdul Rojak, M.Ag.

NIP. 196310151991031003

Penguji IV



Hurin Hayati Alin, S.Hub.Int., M.H.

NIP. 199106012025052003

Surabaya, 26 Maret 2026

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. Hj. Suqiyah Musafahah, M.Ag.

NIP. 196303271999032001



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Muhammad Gilang Romadhon
NIM : 05040422098
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/Hukum Publik Islam
E-mail address : mgilangromadhon034@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

TINJAUAN SIYĀSAH SYAR'IYYAH TERHADAP PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 21 TAHUN 2020 TENTANG PEMBATASAN SOSIAL
BERSKALA BESAR DI INDONESIA

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 7 April 2026

Penulis

Muhammad Gilang Romadhon

Abstrak

Pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia mendorong pemerintah menetapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagai upaya pengendalian penyebaran virus. Kebijakan ini berdampak pada pembatasan berbagai hak asasi manusia, seperti hak bergerak, bekerja, beribadah, dan berkumpul, sehingga menimbulkan perdebatan mengenai batas kewenangan negara dalam membatasi hak warga negara. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk pembatasan hak asasi manusia dalam kebijakan PSBB serta bagaimana pembatasan tersebut ditinjau dari perspektif *siyāsah syar'iyah*.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan meliputi peraturan perundang-undangan terkait PSBB, instrumen hukum hak asasi manusia, serta literatur hukum Islam yang berkaitan dengan *siyāsah syar'iyah* dan *maqāsid asy-syarī'ah*. Data dianalisis secara kualitatif normatif melalui penafsiran dan pengkajian terhadap norma hukum dan prinsip syariah yang relevan.

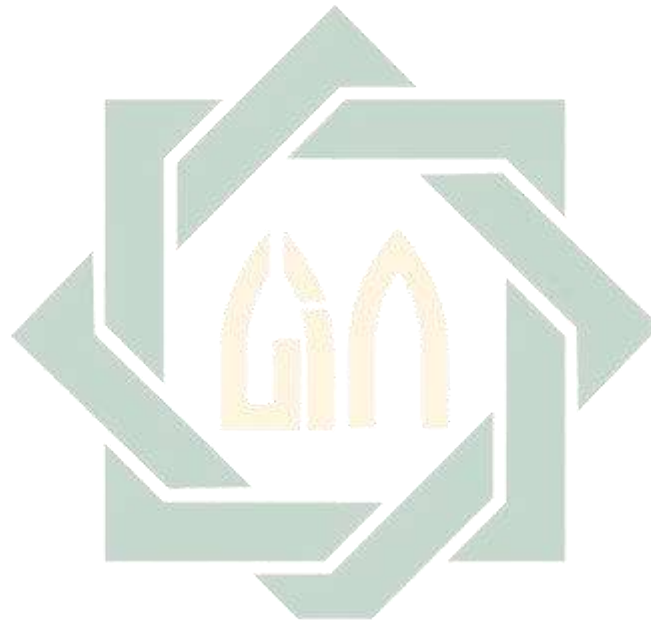
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembatasan hak asasi manusia melalui kebijakan PSBB secara normatif dapat dibenarkan selama memenuhi prinsip legalitas, kebutuhan, proporsionalitas, dan bersifat sementara. Dalam perspektif *siyāsah syar'iyah*, kebijakan PSBB sejalan dengan tujuan syariat, khususnya perlindungan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*) sebagai bagian dari *al-darūriyyāt al-khams*, meskipun dalam praktiknya masih ditemukan berbagai problematika, seperti ketidaksinkronan kebijakan dan kurang optimalnya perlindungan sosial bagi masyarakat terdampak.

Berdasarkan hasil tersebut, penelitian ini menyarankan agar pemerintah dalam merumuskan kebijakan pembatasan hak pada kondisi darurat di masa mendatang lebih memperhatikan prinsip keadilan, akuntabilitas, dan kemaslahatan, serta memastikan adanya perlindungan sosial yang memadai agar pembatasan hak asasi manusia tidak menimbulkan dampak sosial yang berlebihan.

DAFTAR ISI

Pernyataan Keaslian Naskah.....	ii
Persetujuan Pembimbing	iii
Pengesahan.....	iv
Abstrak	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TRANSLITERASI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat Penelitian	8
F. Penelitian Terdahulu	8
G. Landasan Teori.....	17
H. Definisi Operasional	21
I. Metode Penelitian	22
BAB II KONSEP HAK ASASI MANUSIA DAN <i>SIYĀSAH SYAR'IYYAH</i>	27
A. Teori Hak Asasi Manusia.....	27
B. Teori Pembatasan Hak Asasi Manusia.....	30
C. Teori Keadaan Darurat.....	35
D. Teori <i>Siyāsh Syar'iyah</i>	37
BAB III ANALISIS BENTUK PEMBATAHAN HAK ASASI MANUSIA DALAM KEBIJAKAN PEMBATAHAN SOSIAL BERSKALA BESAR (PSBB) DI INDONESIA.....	44
A. Kebijakan PSBB sebagai Instrumen Pembatasan Hak Asasi Manusia..	44
B. Bentuk-Bentuk Pembatasan Hak Asasi Manusia dalam Kebijakan PSBB	47
C. Evaluasi Normatif dan Catatan Kritis terhadap Pembatasan HAM dalam Kebijakan PSBB	55
BAB IV TINJAUAN <i>SIYĀSAH SYAR'IYYAH</i> TERHADAP KEBIJAKAN PEMBATAHAN SOSIAL BERSKALA BESAR (PSBB)	60
A. PSBB sebagai Kebijakan Publik dalam Perspektif <i>Siyāsh Syar'iyah</i> ..	60
B. Perlindungan Jiwa (<i>Hifz al-Nafs</i>) sebagai Dasar Pembena PSBB	62
C. Pembatasan Hak dalam PSBB dan Prinsip Kemaslahatan.....	65
D. Keadilan Sosial dan Tanggung Jawab Negara dalam Perspektif <i>Siyāsh</i> <i>Syar'iyah</i>	66

E. Analisis Kritis PSBB dalam Perspektif Siyāsah Syar'iyah	69
BAB V PENUTUP.....	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran.....	72
Daftar Pustaka.....	74
Lampiran	80
Biodata Penulis	83



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Daftar Pustaka

Buku

- Ashri, Muhammad. *Hak Asasi Manusia: Filosofi, Teori & Instrumen Dasar*. Vol. 12. CV. Social Politic Genius (SIGn), 2018.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Siyasah Syar'iyah dalam pemerintahan Islam*. Al-Hidayah, 2003.
- Mawardi, Imam Al. *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah: Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam*. Darul Falah, 2020.
- Siregar, Rospita Adelina. *Hukum Kesehatan*. Sinar Grafika, 2023.

Jurnal dan Artikel

- Andrizal, dan Rachmad Oky Saputra. "Pengaturan Pelaksanaan Demonstrasi Pada Masa Pandemi Covid-19 | Jurnal Gagasan Hukum." *Jurnal GAGASAN HUKUM* 3, no. <https://journal.unilak.ac.id/index.php/gh/issue/view/461> (20211229). <https://doi.org/10.31849/jgh.v3i02.8910>.
- Borham, Dr Abd Jalil. "Konsep Siyasah Syar'iyah dan Pelaksanaannya Dalam Konteks Malaysia." *Universiti Malaysia Pahang*, 2022, 16.
- Candra, Anton Afrizal. "Pemikiran Siyasah Syar'iyah Ibnu Taimiyah (Kajian Terhadap Konsep Imamah dan Khilafah Dalam Sistem Pemerintahan Islam)." *Fakultas Hukum Universitas Islam Riau* Volume 01, Nomor 02, Oktober 2017 (Oktober 2017): 12.
- Dinata, Ari Wiryana, dan M. Yusuf Akbar. "Pembatasan Hak Untuk Bergerak (Right to Move) melalui Larangan Masuk dan Pembatasan Perjalanan selama Penyebaran Virus COVID-19 menurut Hukum Internasional dan Hukum Indonesia." *Jurnal HAM* 12, no. 2 (Agustus 2021): 305. <https://doi.org/10.30641/ham.2021.12.305-324>.
- Fasya, Muhammad Iqbal. *Analisis Implementasi Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pemanfaatannya Harta Zakat, Infaq dan Shodaqoh untuk Penanggulangan Wabah COVID-19 dan Dampaknya Terhadap Ketahanan Keluarga (Studi Kasus Basnaz Kabupaten Jember)*. 2020.
- Hadi, Fikri, dan Farina Gandryani. "Status Darurat Kesehatan Akibat Pandemi COVID-19 Dalam Perspektif Hukum Tata Negara Darurat di Indonesia." *Arena Hukum* 15 (Desember 2022): 582-609. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2022.01503.7>.
- Hadi, Samsul. "Prinsip-Prinsip Darurat dan Implementasinya Dalam Istibat Hukum (Kajian Terhadap Pemikiran Wahbah Az-Zuhaili)." *Fakultas*

Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2024, 46.

- Herdiana, Dian. "Implementasi Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (Psbb) Sebagai Upaya Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)." *Decision: Jurnal Administrasi Publik* 2, no. 2 (2020). <https://elibrary.ru/item.asp?id=77697995>.
- Hidayatullah, Hidayatullah, dan Nasrullah Nasrullah. "Enforcement of Health Law: The Large Scale Social Limitation In Indonesia Viewed of The Theory Of Al-Maqashid Asy-Syar'iyah." *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran* 20, no. 1 (2020): 41–57.
- Ikhsan, Rd Muhammad, dan Nurhidayatulloh Nurhidayatulloh. "Pembatasan HAM Dengan Alasan Public Health Emergency Dalam Hukum HAM Dan Hukum Pidana Indonesia." *Simbur Cahaya*, 31 Desember 2021, 265–81. <https://doi.org/10.28946/sc.v28i2.901>.
- Juaningsih, Imas Novita. "Analisis Kebijakan PHK Bagi Para Pekerja Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia." *BULETIN ADALAH* 4, no. 1 (Mei 2020): 189–96. <https://doi.org/10.15408/adalah.v4i1.15764>.
- Livingston, Edward, Karen Bucher, dan Andrew Rekito. "Coronavirus Disease 2019 and Influenza 2019-2020." *JAMA* 323, no. 12 (Maret 2020): 1122. <https://doi.org/10.1001/jama.2020.2633>.
- M. Reza Saputra, Irwan Triadi, dan Taufiqurrohman Syahuri. "Hukum Tata Negara Darurat dalam Perspektif HAM : Dilema Antara Keamanan Negara dan Hak Asasi Manusia." *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara* 2, no. 4 (November 2024): 182–94. <https://doi.org/10.55606/birokrasi.v2i4.1585>.
- Maulana, Yusup. "Analisis pasal 13a Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 14 tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan presiden nomor 99 tahun 2020 tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemik corona virus Disease 2019 (Covid-19)." Other, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2025. <https://digilib.uinsgd.ac.id/102953/>.
- Muis, Afni Regita Cahyani. "Transparansi Kebijakan Publik Sebagai Strategi Nasional Dalam Menanggulangi Pandemi Covid-19." *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 7, no. 5 (April 2020). <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i5.15317>.
- Mujib, Moh. "Kebijakan Merubah Kebiasaan Masyarakat Dengan Menerapkan Standart Protokoler Pencegahan Virus Covid- 19 Melalui Peraturan Walikota Surabaya Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar." Universitas Islam Malang, 2021.

- Nuh, Muhammad Syarif Nuh Syarif. "Hakekat Keadaan Darurat Negara (State Of Emergency) Sebagai Dasar Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 18, no. 2 (2011): 229–46. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol18.iss2.art5>.
- Paryadi. *Maqashid Syariah : Definisi Dan Pendapat Para Ulama*. 4 (Juli 2021): 16.
- Perbawa, I. Ketut Sukawati Lanang Putra. "Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Menanggulangi Covid-19 Berdasarkan Instrumen Hukum Internasional." *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 10, no. 1 (April 2021): 197–205. <https://doi.org/10.23887/jish-undiksha.v10i1.33517>.
- Prabowo, Rian Adhivira. "Limitasi atas Pengaturan HAM dalam Konstitusi." *Indonesian State Law Review (ISLRev)* 2, no. 2 (Mei 2020): 148–66. <https://doi.org/10.15294/islrev.v2i2.38442>.
- Putri, Retno, Rahmawati Sari, Rita Wahyuningsih, Ety Meikhati, dan Alpian Aji. "Efek Pandemi Covid 19: Dampak Lonjakan Angka PHK terhadap Penurunan Perekonomian di Indonesia." *Jurnal Bisnis Manajemen dan Akuntansi (BISMAK)* 1 (Juli 2021): 72–77. <https://doi.org/10.47701/bismak.v1i2.1206>.
- Qotadah, Hudzaifah. "Covid-19: Tinjauan Maqasid Al-Shariah Terhadap Penanggulangan Pelaksanaan Ibadah Shalat Di Tempat Ibadah (Hifdz al-Nafs Lebih Utama Dari Hifdz al-Din?)." *SALAM Jurnal Sosial dan Budaya Syar* i 7 (Mei 2020). <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i7.15676>.
- Rahmadani, Widya, dan Sagita Charolina Sihombing. "Analisis Penyebaran Virus Covid-19 di Provinsi Sumatera Selatan Menggunakan Metode Interpolasi Lagrange." *Jurnal Penelitian Fisika dan Terapannya (JUPITER)* 2, no. 1 (Juli 2020): 12. <https://doi.org/10.31851/jupiter.v2i1.5314>.
- Ristyawati, Aprista. "Efektifitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Masa Pandemi Corona Virus 2019 oleh Pemerintah Sesuai Amanat UUD NRI Tahun 1945." *Administrative Law and Governance Journal* 3, no. 2 (Juni 2020): 240–49. <https://doi.org/10.14710/alj.v3i2.240-249>.
- S. Matompo, Osgar. "Pembatasan Terhadap Hak Asasi Manusia Dalam Prespektif Keadaan Darurat." *Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu. Jalan Hang Tuah No.29 Palu* VOL. 21 NO.1 JUNI 2014 (Juni 2014). <https://share.google/2ljudTtX7aoheOt5A>.
- Samsuduhah, St. "Masalah Kebijakan Penvegahan Wabah Pandemi Covid-19 Dalam Islam." *Al-Tafaqquh: Journal of Islamic Law* 1, no. 2 (Juli 2020): 117–27. <https://doi.org/10.33096/al-tafaqquh.v1i2.63>.

- Tiara Putri Azizah, Ferdiyansyah, dan Ronggo Warsito Muhammad Dodi Oktafianur. *Isu Hukum Dalam Penanganan Pandemi: Evaluasi Respons Hukum Terhadap Krisis Kesehatan di Indonesia*. 7 Juni 2024. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.11515600>.
- Tobroni, Faiq. “Pelarangan Aktivitas Kelompok Keagamaan Tanpa Komentar Umum KIHSP.” *Jurnal Yudisial* 13, no. 2 (2020): 125–44. <https://doi.org/10.29123/jy.v13i2.438>.
- . “Pembatasan Kegiatan Keagamaan Dalam Penanganan COVID-19.” *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 6, no. 2 (Agustus 2020): 369–95. <https://doi.org/10.23887/jkh.v6i2.28062>.
- . “Penanganan Covid-19 Dan Pengembangan Hukum Ham Konteks Indonesia: -.” *Istinbath: Jurnal Hukum* 17, no. 2 (2020): 176–201. <https://doi.org/10.32332/ijh.v17i2.2294>.
- Wardani, Alamsyah Mustika, Sofwan Sofwan, dan Haeruman Jayadi. “Analisis Kebijakan Pemerintah Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Dalam Pencegahan Dan Penanganan Covid.19.” *Jurnal Diskresi* 1, no. 2 (Desember 2022). <https://doi.org/10.29303/diskresi.v1i2.2098>.
- Wardhani, Nurwidya Kusma. “Penerapan Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Indonesia dalam Prespektif Hukum dan HAM.” *KELUWIH: Jurnal Sosial dan Humaniora* 2 (April 2021): 34–38. <https://doi.org/10.24123/soshum.v2i1.3990>.
- . “Penerapan Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Di Indonesia Dalam Prespektif Hukum Dan HAM.” *Keluwih: Jurnal Sosial Dan Humaniora* 2, no. 1 (April 2021): 33–37. <https://doi.org/10.24123/soshum.v2i1.3990>.
- Yuliana, Nurul, Nazwa Rahmadani, dan Meyvina Putri. “Kepemimpinan Dalam Perspektif Siyasa Syar’iyyah: Relevansi Konsep Imamah Dan Demokrasi Modern.” *Equality: Law and Social* 1, no. 1 (Agustus 2025): 34–40.
- Yuliani, Sri. “Regulasi Keselamatan Dan Keamanan Pelayaran Di Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).” Universitas Borneo Tarakan, 2022. Perpustakaan UBT. [//repository.ubt.ac.id/2F%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D10938](http://repository.ubt.ac.id/2F%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D10938).

Internet dan Web Page

- Al-Jawziyyah, Ibn Qayyim. “I’laam al-Mouwaqi’in ’an Rabb Il-’Alamin - Ibn Qayyim al-Jawziya.” Sifatufafwa. Diakses 20 Januari 2026. <https://www.sifatufafwa.com/en/usool-al-fiqh/i-lam-al-muwaqi-in-an-rabb-il-alam-in-ibn-qayyim-al-jawziyyah.html>.

- Avie, S.H., Johan. "Pembatasan Ham." pusham.uui.ac.id, 25 April 2015. https://pusham.uui.ac.id/wp-content/uploads/2023/05/Pembatasan_HAM.pdf.
- BPK, JDIH. "Perpres No. 1 Tahun 2020." Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses 18 Desember 2025. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/131845/perpres-no-1-tahun-2020>.
- . "PP No. 21 Tahun 2020." Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses 12 Januari 2026. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/135059/pp-no-21-tahun-2020>.
- . "UU No. 39 Tahun 1999." Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses 14 Januari 2026. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/45361/uu-no-39-tahun-1999>.
- Qur'an. com "Surah Al-Anbya - 107." Quran.Com. Diakses 25 Maret 2026. <https://quran.com/al-anbya/107>.
- . "Surah Al-Hajj - 41." Quran.Com. Diakses 25 Maret 2026. <https://quran.com/al-hajj/41>.
- . "Surah An-Nahl - 106." Quran.Com. Diakses 25 Maret 2026. <https://quran.com/an-nahl/106>.
- . "Surah Ash-Shuraa - 38." Quran.Com. Diakses 25 Maret 2026. <https://quran.com/ash-shuraa/38>.
- Tim, Hukumonline. "Perlindungan HAM dalam Pasal 28A sampai 28J UUD 1945." hukumonline.com. Diakses 15 Desember 2025. <https://www.hukumonline.com/berita/a/pasal-28a-sampai-28j-uud-1945-lt642a9cb7df172/>.
- Badan Pusat Statistik, Indonesia. "Gini Ratio September 2020 tercatat sebesar 0,385." Diakses 10 Februari 2026. <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2021/02/15/1852/gini-ratio-september-2020-tercatat-sebesar-0-385.html>.
- Redaksi. "Kemaslahatan Umum (Al-Maslahah Al-‘Ammah)." Hikmah. *Keadilan dan Kesetaraan Gender - Mubadalah*, 12 Februari 2025. <https://mubadalah.id/kemaslahatan-umum-al-maslahah-al-ammah/>.
- Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kalimantan Barat. "Fatwa MUI No 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah dalam Situasi Wabah Covid-19." *Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kalimantan Barat*, 25 Maret 2020. <https://kalbar.mui.or.id/2020/03/25/fatwa-mui-no-14-tahun-2020-tentang-penyelenggaraan-ibadah-dalam-situasi-wabah-covid-19/>.

Perpus, Teknik. *Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan HAM: Kenyataan Serius Yang Perlu Kita Perhatikan - PerpusTeknik.Com*. Tanya Jawab. 30 November 2023. <https://perpusteknik.com/faktor-yang-mempengaruhi-penegakan-ham/>.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A